



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUKI ZAIMAN PRAWIRA
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 59982

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.080.800.000

1. Tanah Seluas 390 m² di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 312.000.000
2. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m²/180 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4405 m²/240 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , WARISAN Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 2500 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 22350 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 158.800.000
9. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
10. Tanah Seluas 900 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 24.82 m²/24.82 m² di KAB / KOTA



KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	190.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.		
190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	567.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	948.230.505
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.786.480.505
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.786.480.505

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.